

KURIKULUM PENDIDIKAN TINGGI DI ERA GLOBALISASI (PERGESERAN DARI KURIKULUM INTI DAN INSTITUSIONAL KE KURIKULUM BERBASIS KOMPETENSI)

Febriyanti

Fakultas Tarbiyah dan Keguruan IAIN Raden Fatah Palembang

Abstract

Higher Education is a strategic economic engine as it plays a key role in the development and application of knowledge, expertise, skills and noble values of society through the development of the society with intensive knowledge to establish a civilized and independent society.

One of the goals of education arranged by any institutions is to provide and produce graduates who have the ability and competitiveness in the search, acquisition, and creation of jobs. On the issue of competitiveness, unfortunately the condition of human resources (HR) in Indonesia is at a low level. One reason for the low competitiveness is lies on the higher education curriculum which is based on the content (content-based) that focuses on achievement (GPA) which describes the cognitive aspect, not on competence.

One of the changes that must be done is to change the curriculum. Competency Based Curriculum (CBC) is believed to be the best answer to the changing times for the provision of education. Even, the curriculum is an answer to the nation in order to achieve a competitive advantage in the world (nation competitiveness).

Keywords: *Higher education, Core curriculum, Competency based curriculum (CBC)*

A. Pendahuluan

Pemberlakuan otonomi Perguruan Tinggi, memberikan peluang sekaligus tantangan bagi setiap Perguruan Tinggi untuk mengeksplorasi dan menggali segenap potensi yang dimilikinya agar dapat menjadi suatu institusi pendidikan tinggi yang bermartabat serta mempunyai

peranan yang penting dalam meningkatkan *national competitiveness* terutama pada era globalisasi. Menderasnya arus tantangan dan perubahan yang terjadi dalam berbagai aspek kehidupan, seperti sosial budaya, politik dan ekonomi, adalah konsekuensi logis dari globalisasi. Sebagai suatu institusi penghasil sumber daya manusia (SDM) pilihan, Perguruan Tinggi juga tidak dapat terlepas dari pengaruh-pengaruh perubahan yang terjadi terutama untuk mengantisipasi pergeseran paradigma ekonomi abad 21 ke arah *knowledge based economy*. *Knowledge based economy* merupakan suatu persaingan ekonomi yang berbasis pada ilmu pengetahuan.

Persaingan ekonomi hanya dapat dimenangkan oleh bangsa yang mempunyai tingkat kemampuan bersaing (*competitiveness*) yang tinggi. Dengan demikian, suatu bangsa harus mempunyai keunggulan, baik keunggulan kompetitif maupun keunggulan komparatif agar dapat bersaing dalam percaturan global. Dewasa ini kita sedang memasuki era baru, yaitu era eksploitasi ilmu pengetahuan. Penguasaan dan aplikasi ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan sumber strategi kunci yang diperlukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan bangsa. Dengan melaksanakan Tri Dharma, Perguruan Tinggi memiliki peranan strategis untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan bangsa. Dengan kata lain Perguruan Tinggi merupakan suatu *strategic economic engine* karena Perguruan Tinggi memainkan peranan kunci dalam pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan, kepakaran dan keahlian serta nilai-nilai luhur masyarakat melalui pembangunan masyarakat *knowledge intensive* menuju masyarakat yang beradab dan berdaya. Ketergantungan masyarakat pada perguruan tinggi akan semakin besar, karena perguruan tinggi berperan sebagai sumber pengembangan IPTEKS, pendidik SDM dan penyedia informasi, ilmu pengetahuan serta sumber pembelajaran sepanjang masa. Dengan peranan dan tanggung jawab pendidikan tinggi yang sedemikian besar, maka pengembangan kurikulum pendidikan tinggi menjadi isu strategis karena berkaitan langsung dengan kualitas lulusan yang akan menjadi tulang punggung daya saing suatu bangsa (*higher education for national sustainability*). Kurikulum bukan sekedar daftar matakuliah yang

dijabarkan ke dalam silabus yang dapat diambil langsung dari daftar isi buku. Kurikulum seyogyanya mencakup filosofi (visi dan misi) tujuan pendidikan dan kandungan program studi.

Kurikulum juga harus memuat dampak yang direncanakan dari hasil pembelajaran (kompetensi) untuk masa kini dan masa yang akan datang, baik pada aspek normatif, keahlian dan aspek sosial, metode pembelajaran, metode penilaian dan evaluasi yang diterapkan maupun sumberdaya yang diperlukan.

Di dalam menyongsong masa depan pada umumnya orang sependapat bahwa tidak ada sesuatu yang pasti. Para ahli dapat saja membuat berbagai ramalan atau prediksi namun akurasi dari ramalan atau prediksi tersebut tidak dijamin. Dalam keadaan yang sedemikian, sesuatu yang pasti adalah perubahan atau *change* itu sendiri. Perubahan terjadi secara terus-menerus dalam skala dan intensitas yang semakin meningkat. Khususnya dalam dua tiga dekade terakhir ini, perubahan tersebut telah terjadi dalam skala dan intensitas yang sangat tinggi. Pendorong utama dari perubahan ini adalah perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemajuan yang sangat pesat dalam pemahaman kita tentang dunia diterapkan dan dikembangkan secara cepat dan meluas dalam berbagai bidang seperti industri, pertanian, kedokteran dan jasa. Berbeda dengan masa sebelumnya, tingkat kecepatan yang membawa perubahan ini, menembus batas-batas nasional (*footloose*). Dengan demikian, ilmu pengetahuan, teknologi dan pengetahuan manajerial cepat menyebar sehingga menambah jumlah bangsa yang memiliki kemampuan teknis untuk produksi dan rekayasa. Hal ini lebih dimungkinkan lagi oleh kemampuan dan kecepatan komunikasi misalnya dalam bidang transportasi, satelit dan jaringan komputer. Oleh karena itu, cakupan dari berbagai kegiatan produksi termasuk penelitian, rekayasa, produksi dan pemasaran dalam banyak sektor industri telah berkembang menjadi global.

Sejalan dengan hal tersebut, telah terjadi pula perubahan pesat di bidang sosial budaya masyarakat. Kriteria mengenai pembangunan sosial yang sebelumnya bersifat lokal berkembang menjadi kriteria yang bersifat global. Pendidikan merupakan faktor utama yang

menggerakkan perubahan yang terjadi tersebut. Dan dalam bidang pendidikan ukuran mengenai perkembangannya mengikuti standar internasional. Kecenderungan yang serupa terjadi pada bidang apresiasi budaya di mana terlihat kebangkitan kembali kesadaran akan seni dari berbagai anggota masyarakat di dunia (*the art boom*).

Salah satu tujuan penyelenggaraan pendidikan oleh sebuah institusi adalah untuk menyediakan dan menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan dan daya saing dalam pencarian, perolehan, dan penciptaan pekerjaan. Pada persoalan daya saing, sayang sekali kondisi sumber daya manusia (SDM) di Indonesia berada pada taraf yang rendah. Laporan terbaru dari *World Competitiveness Yearbook* 2009, menetapkan daya saing (mahasiswa) kita berada pada peringkat ke 42. Peringkat ini masih lebih rendah di banding dengan negara Asia Tenggara lainnya, yaitu Singapura (ke-3), Malaysia (ke-18), dan Thailand (ke-26) (Tamidi, 2010) Bahkan kalah dengan Vietnam (Departemen Pendidikan Nasional, 2003: 5). Salah satu sebab dari rendahnya daya saing itu terletak pada kurikulum pendidikan tinggi yang masih berbasis pada isi (*content based*), bukan pada kompetensi (Tamidi, 2010).

Kurikulum yang *content based*, menitikberatkan pada pencapaian Indeks Prestasi (IP) dengan indikator kualitas lulusan mendasarkan pada IPK, lama studi dan predikat kelulusan yang disandang (Sub Direktorat KPS (Kurikulum dan Program Studi, 2009: 4), padahal IP hanya menggambarkan kemampuan dari aspek kognitif (*hardskill*), yang dalam dunia kerja masa sekarang dianggap kurang penting dibandingkan dengan kemampuan dari aspek afektif dan psikomotorik yang berupa *softskill*. Bahkan dari hasil survey, yang dilakukan Pusat Kurikulum Depdiknas terungkap bahwa kunci kesuksesan adalah 80% *mindset* dan 20% *technical skill* (Tarmidi, 2010: 2).

Keterpurukan daya saing SDM kita tak lepas dari perubahan yang terjadi pada Abad XXI dan kondisi permintaan pasar kerja yang tak segera direspon oleh penyelenggara pendidikan. Perubahan jaman menghendaki dilakukannya perubahan pendidikan tinggi yang bersifat mendasar, berupa perubahan dari pandangan kehidupan masyarakat

lokal ke masyarakat dunia (global), perubahan dari kohesi sosial ke partisipasi demokratis, dan perubahan dari pertumbuhan ekonomi ke perkembangan kemanusiaan (Sub Direktorat KPS, 2009: 1).

Salah satu perubahan yang harus segera dilakukan adalah perubahan kurikulum. Kurikulum pada hakekatnya adalah sebuah program yang disusun untuk mencapai tujuan pendidikan, akan tetapi seringkali perubahan kurikulum seringkali hanya berfokus pada pengubahan dokumen saja, dan pelaksanaan pembelajaran, penciptaan suasana belajar, cara evaluasi pembelajaran seringkali tidak berubah. Perubahan kurikulum menjadi keharusan, jika *output* yang dihasilkan oleh penyelenggaraan pendidikan telah bergeser, sesuai dengan perkembangan jaman dan tuntutan dari pasar kerja. Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) diyakini merupakan jawaban terbaik atas perubahan jaman bagi penyelenggaraan pendidikan, bahkan dikatakan oleh Dewa Komang Tantra (2009) bahwa KBK merupakan jawaban untuk mencapai keunggulan bangsa sehingga mampu bersaing di dunia (*nation competitiveness*).

B. Pergeseran Paradigma Pembelajaran di Perguruan Tinggi dan Pengembangan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK)

Lemahnya daya saing lulusan Perguruan Tinggi di Indonesia memerlukan perubahan besar dalam sistem pendidikan tinggi di Indonesia. UNESCO (1998) menjelaskan bahwa untuk melaksanakan empat perubahan besar di pendidikan tinggi tersebut, dipakai dua landasan berupa empat pilar pendidikan dan belajar sepanjang hayat (*learning throughout life*). Empat pilar pendidikan itu adalah *learning to know*, *learning to do*, yang bermakna pada penguasaan kompetensi dari pada penguasaan keterampilan menurut klasifikasi ISCE (*International Standard Clasification of Education*) dan ISCO (*International Standar of Occipation*), dematerialisasi pekerjaan dan kemampuan berperan untuk menanggapi bangkitnya sektor layanan jasa, dan bekerja di kegiatan ekonomi informasi; *learning to live together (with others)*, dan *learning to be*. Sedangkan belajar sepanjang hayat merupakan wujud dari *imperative for democracy*; pendidikan multidimensional;

munculnya *new times, fresh fields*; pendidikan *at the heart of society*; dan kebutuhan sinergi dalam pendidikan (UNESCO, *Higher Education in the Twenty-first Century: Vision and Action. World Conference on Higher Education*. Paris, 5-9 October 1998).

Saran UNESCO untuk melakukan perubahan besar dalam sistem pendidikan direspon dengan adanya perubahan kurikulum dari konsep Kurikulum Nasional 1994 ke Kurikulum Inti dan Institusional pada 2000 dan dilanjutkan dengan Kurikulum Berbasis Kompetensi 2002. Perubahan kurikulum dari Kurikulum Inti dan Institusional (Kepmendiknas No. 232/U/2000) ke KBK (Kepmendiknas No. 45/U/2002) lebih banyak di dorong oleh masalah-masalah global atau eksternal (Sub Direktorat KPS, 1-9) yaitu: *Pertama*, persaingan di dunia global yang berakibat juga terhadap persaingan perguruan tinggi di dalam negeri maupun di luar negeri sehingga perguruan tinggi dituntut untuk menghasilkan lulusan yang dapat bersaing dalam dunia global; *kedua*, adanya perubahan orientasi pendidikan tinggi yang tidak lagi hanya menghasilkan manusia cerdas berilmu, tetapi juga yang mampu menerapkan keilmuannya dalam kehidupan di masyarakatnya (kompeten dan relevan) yang lebih berbudaya; dan *ketiga* adanya perubahan kebutuhan di dunia kerja yang terwujud dalam perubahan persyarikat dalam menerima tenaga kerja, yaitu adanya persyaratan *softskills* yang dominan di samping *hardskill*-nya.

Beberapa kalangan berpendapat bahwa KBK merupakan jawaban jitu terhadap permasalahan mutu pendidikan, sedangkan kalangan lain berpendapat KBK merupakan jawaban yang keliru. KBK menuai popularitas di Amerika Serikat pada tahun 1970-an sebagai dasar untuk pendidikan vokasional bagi tenaga kependidikan. KBK juga berkembang di Inggris dan Wales pada awal 1986, kemudian Selandia Baru, Australia dan Indonesia pada paruh akhir tahun 1980-an. Meski demikian, di beberapa negara KBK menuai berbagai kritik. KBK sifatnya sangat individualis, menekankan pada *outcomes* (apa yang diketahui dan apa yang dapat dilakukan), dan prosedurnya sangat fleksibel. Pendekatan kompetensi memperjelas bagaimana *outcomes* dapat dicapai dengan mutu pencapaian menurut standar nasional

maupun internasional. Secara teoretis, KBK meniadakan perbedaan antara “tangan dan pikiran, teori dan praktik, umum dan spesifik dalam pendidikan” (R. Harris dkk, 1995). Bagi yang tidak sejalan dengan KBK, mereka menyebut KBK sebagai sesuatu yang sangat reduksionistik, sempit, kaku, teoretis, empiris, dan pedagogis yang sangat tidak memadai. Meski demikian, keduanya – yang pro dan kontra – setuju apabila kompetensi tersebut dikonsepsikan ke dalam bentuk perilaku (*behavioral terms*) (Dewa Komang Tatra, 2009: 4).

Dengan mendasarkan pada mereka yang pro dan kontra KBK, berpendapat bahwa KBK berada di antara mitos dan realita. Disebut mitos – dengan mendasarkan pada pendapat yang kontra KBK – karena KBK hanyalah merupakan sebuah pendekatan kebijakan (*policy approach*), sebuah mitos dalam pendidikan, yang masih perlu dikaji secara intensif sebelum diimplementasikan. KBK disebut sebagai realita karena KBK bukan saja sebuah pendekatan dalam kebijakan (*policy approach*), tetapi KBK dapat direalisasikan dalam pembelajaran di sekolah untuk mengembangkan kompetensi standar pembelajaran di sekolah untuk mengembangkan kompetensi standar (Dewa Komang Tantra, 2009: 7-9).

Ada beberapa argumen yang perlu dikemukakan dari mereka yang menolak KBK. *Pertama*, pendekatan KBK yang sangat *behavioral* sering dicerca karena tidak memperhatikan hubungan antara tugas atribut yang melandasi sebuah perilaku, makna, kemauan, atau disposisi sebuah perilaku atau tindakan, konteks dari perilaku, dan dampak aspek interpersonal dan etis (A. Gonczi, 1997: 77-108). Mengingat sifat dunia nyata sangat kompleks dan tidak menentu, ditengarai bahwa tujuan-tujuan yang dirumuskan dalam bentuk perilaku-perilaku terukur tidak dapat sepenuhnya diukur dan diamati sepenuhnya. Rumusan-rumusan perilaku cenderung bersifat diskrit, sehingga ditengarai sebagai sebuah upaya mengatomisasi perilaku yang sebenarnya bersifat holistik dan utuh (*intact behaviors*) (N. Jackson, 1994: 135-149). Lagipula, perilaku yang diklaim telah diukur dianggap sebagai sebuah perilaku akhir (*ultimate behavior*), walau sesungguhnya menurut pandangan konstruktivis bahwa perilaku tersebut bukanlah yang final, tetapi ia akan

direvisi, dikonstruksi ulang, atau diubah menjadi sesuatu yang lebih sempurna (Dewa Komang Tantra. 2009: 4).

Kedua, Collins menyebutkan bahwa KBK mengingkari hasil penelitian yang pernah dilakukan selama 100 tahun di bidang psikologi, pendidikan, organisasi, maupun dalam bidang kebudayaan. Khususnya, ia tidak sependapat dengan batasan yang digunakan oleh penganut aliran behaviorisme tentang *skill* dan *competence* sebagai sebuah perilaku yang bersifat sangat individual dan bebas tata nilai. Padahal, *skill* dan *competence* kenyataannya merupakan sebuah hasil konstruksi sosial dan praktik kebudayaan yang aktif dan kreatif (C. Collin, 1993: 89). Lebih-lebih lagi, validitas teknik pengukuran yang didasarkan pada model pembelajaran secara behavioristik sangat problematik sebagai indikator model pembelajaran yang signifikan (J. Barrie dan R.W. Pace. 1997: 340).

Ketiga, model pengecekan terhadap pemerolehan kompetensi berdasarkan pada teknik *checklist* yang menandai dicapai/tidaknya dicapainya kompetensi dimaksud dipandang sangat menyederhanakan sebuah persoalan yang sesungguhnya sangat kompleks. Penilaian terhadap pencapaian sebuah kompetensi yang didasarkan pada pencapaian kompetensi minimum sangat tidak memotivasi seseorang untuk mencapai kompetensi standar. Kompetensi minimum hanyalah merupakan tingkatan perilaku yang dapat diterima (*acceptable level of competency*), bukan berarti kompetensi minimum telah berkesesuaian dengan kompetensi standar yang ditetapkan secara nasional maupun secara internasional (*a standard of excellence*) (Dewa Komang Tantra, 2009: 6).

Keempat, Jackson menilai bahwa KBK bersikap sangat birokratis, teralalu rumit, mahal, dan membutuhkan waktu yang banyak untuk mengimplementasikan di sekolah (N. Jackson, 1994: 135-149). Hayland (1994) dalam penelitian menyimpulkan bahwa banyak sekolah atau lembaga pendidikan di dunia yang tidak bersedia mengimplementasikan KBK.

Kelima, kendatipun pendekatan kompetensi bersifat kompatibel dengan model pembelajaran kognitif, tetapi KBK tidak cocok

diterapkan pada lembaga pendidikan tinggi (Hyland, 1994: 136) karena kompetensi terlalu dibatasi secara sempit dan justru kompetensi meniadakan keberadaan sebuah kurikulum serta mempersempit materi (Dewa Komang Tantra, 2009: 6).

Terhadap kritik dari penentang KBK ini, para pendukung penerapan KBK dalam penyelenggaraan pendidikan berpendapat sebagai berikut :

Pertama, Erridge dan Perry (1994:140) yakin bahwa “... *it gives individuals opportunities to achieve qualifications that relate to required performance in the workplace ...*”. Bagi keduanya, KBK diyakini memberi peluang bagi seseorang untuk mencapai kualifikasi yang dibutuhkan. KBK diyakini merupakan sebuah rencana dan pengaturan tentang kompetensi dan pemberdayaan sumberdaya secara efisien dan efektif. KBK diyakini dapat memberikan layanan terhadap peserta didik sesuai dengan kemampuan dan potensi yang dimilikinya. Dengan demikian, KBK bukannya menghasilkan lulusan yang memiliki pengetahuan sebanyakbanyaknya, melainkan lulusan yang memiliki kemampuan dan sikap untuk meningkatkan kehidupannya di masyarakat (Dewa Komang Tantra, 2009: 7).

Kedua, Jones dan Moore (1995: 78-92) berpendapat bahwa KBK menerapkan pendekatan kompetensi tunggal (*one competency-based approach*), yang dapat dengan mudah dispesifikasi menjadi perilaku-perilaku terukur menurut bidang tugas dan garapannya. *Ketiga*, penetapan kompetensi standar akan memberdayakan individu, sehingga individu tersebut akan mampu melakukan pilihan di antara apa yang harus dipelajari (*learning what to be learned*) dan bagaimana harus belajar (*learning how to learn*). Velde dan Hopkins bahkan menambahkan bahwa dalam KBK “... *there is less control from bureaucratic power-holder and more decision making made by consumers themselves*”. Jadi KBK memberikan kesempatan cukup luas kepada siswa untuk mencapai kompetensi yang diharapkan sesuai dengan kemampuan dan potensinya masing-masing. Fleksibilitas pembelajaran dijamin bila menggunakan KBK. Perangkat KBK bukan lagi menjadi kewenangan pusat melainkan kewenangan daerah sesuai

dengan kondisi dan potensi masing-masing. KBK memberi peluang yang amat besar dan fleksibel bagi guru/sekolah/daerah untuk mengembangkan potensinya masing-masing sesuai dengan kebutuhan dan daya dukung masing-masing (Dewa Komang Tantra, 2009: 7-8).

Keempat, target perilaku yang ingin menjadi sasaran dirumuskan secara jelas untuk setiap jenjang dan jenis kompetensi. Komponen kompetensi dasar, materi standar, dan indikator pencapaian hasil belajar ditetapkan dan disajikan secara terpadu. Materi-materi yang dibentuk diarahkan pada pencapaian sebuah kompetensi. Materi-materi pelajaran tidak dimaksudkan untuk dihafal melainkan harus diperagakan dan didemonstrasikan agar tercapai kompetensi yang dimaksud.

Kelima, guru/dosen diberi kesempatan yang luas untuk berkreasi dan mengembangkan materi-materi pokok secara kreatif agar kompetensi yang ditetapkan sebelumnya terjamin dapat tercapai oleh siswa. Empat pilar UNESCO, yaitu *learning to know*, *learning to do*, *learning to be*, *learning to live together* diakomodasikan secara integratif dan proporsional dalam pembelajaran siswa. Aspek kognitif, afektif dan psikomotorik diperlakukan sebagai sebuah perilaku yang utuh yang melandasi sebuah kompetensi. Model pembelajaran berorientasi pada siswa (*student-oriented learning*). Di samping itu, kecakapan bekal hidup diakomodasi dalam pembelajaran secara terpadu (Dewa Komang Tantra, 2009: 8).

Keenam, sistem pembelajaran tuntas benar-benar diterapkan. Seseorang siswa dapat meneruskan ke jenjang kompetensi yang berikutnya bila ia sudah mencapai kompetensi sebelumnya sesuai dengan batas kompetensi minimum. Sistem manajemen peningkatan mutu dilakukan berdasarkan pada manajemen berbasis sekolah dan menggalang partisipasi aktif dari semua *stakeholders* yang potensial.

Ketujuh, sistem penilaian yang digunakan bersifat berkelanjutan, yaitu mengacu pada keberlangsungan proses dan sistem penilaian berbasis kelas (*classroom-based assessment*), yang dapat berbentuk test uraian, porto folio, atau tugas.

Kedelapan, KBK menerapkan sebuah kurikulum berdiversifikasi, yaitu dengan mengklasifikasi siswa yang berkemampuan normal,

sedang atau tinggi. Siswa yang berkemampuan normal dituntut sebatas memiliki kompetensi minimum, sedangkan siswa yang memiliki kemampuan tinggi dituntut untuk mencapai kompetensi standar. Guru/dosen diberikan kebebasan untuk menetapkan materi yang cocok untuk siswanya. Dengan kebebasan tersebut, guru/dosen memiliki peluang yang cukup tinggi untuk mengembangkan materi-materi yang memiliki karakteristik lokal. Tak dapat dipungkiri bahwa KBK selain memiliki keunggulan, juga memiliki kekurangan. Akan tetapi ini tak menyurutkan pemerintah untuk menentukan kebijakan penerapan KBK di semua jenjang pendidikan. Departemen Pendidikan Nasional (sekarang Kementrian Pendidikan Nasional) mulai memberlakukan KBK sejak 2002, yang tertuang dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 232/U/2000 dan No. 045/U/2002 yang mengamanatkan penyusunan kurikulum pendidikan tinggi yang berbasis kompetensi untuk setiap program studi oleh kalangan perguruan tinggi yang bersangkutan (bukan oleh pemerintah). Konsekuensinya adalah pengembangan kurikulum diserahkan kepada masing-masing perguruan tinggi (PT), ini sesuai dengan konsep otonomi PT.

Jadi Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) ialah kurikulum yang disusun berdasarkan elemen-elemen kompetensi yang dapat menghantarkan peserta didik untuk mencapai kompetensi utama, kompetensi pendukung, dan kompetensi lainnya (Tarmidi, 2010:4). Penetapan kompetensi utama, pendukung dan kompetensi lainnya tak lepas dari perumusan mengenai profil lulusan. Maksudnya adalah profesi apa yang akan diemban oleh lulusan setelah menyelesaikan pendidikannya. Dari identifikasi profil lulusan itu maka akan ditentukan kompetensi apa yang harus dipunyainya. Setelah kompetensi itu terbentuk, barulah menyusun pengelompokan mata kuliah berdasarkan elemen kompetensinya, yang terdiri dari landasan kepribadian, penguasaan ilmu dan keterampilan, kemampuan berkarya, sikap dan perilaku dalam berkarya menurut tingkat keahlian berdasarkan ilmu dan keterampilan yang dikuasai; dan pemahaman kaidah berkehidupan bermasyarakat sesuai dengan pilihan keahlian dalam berkarya.

Konsep ini digunakan untuk mengakomodasi kebutuhan masyarakat yang menjadikan perguruan tinggi sebagai tempat pembelajaran dan suatu sumberdaya pengetahuan, pusat kebudayaan, serta tempat pembelajaran terbuka untuk semua. Oleh karena itu dimasukkan strategi kebudayaan dalam pengembangan pendidikan tinggi. Strategi kebudayaan tersebut berujud kemampuan untuk menangani masalah-masalah yang terkait dengan berbagai aspek, yaitu *pertama*, fenomena *anthrophos*, dicakup dalam pengembangan manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, berkepribadian mantap, dan mandiri serta mempunyai rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan; *kedua*, fenomena *tekne*, dicakup dalam penguasaan ilmu dan keterampilan untuk mencapai derajat keahlian berkarya; *ketiga*, fenomena *oikos*, dicakup dalam kemampuan untuk memahami kaidah kehidupan bermasyarakat sesuai dengan pilihan keahlian dalam berkarya; dan *keempat*, fenomena *ethnos*, dicakup dalam pembentukan sikap dan perilaku yang diperlukan seseorang dalam berkarya menurut tingkat keahlian berdasarkan ilmu dan keahlian yang dikuasai (Sub Direktorat KPS, 2009:9). Illah Sailah (2008) menyatakan bahwa kurikulum berbasis kompetensi berupaya untuk mensinergikan *hardskills* dan *softskills*. Untuk mengimplementasikannya diperlukan keberanian untuk berubah, kreativitas dosen dalam mengoptimalkan sumberdaya fasilitas dan kemauan serta komitmen yang kuat dari pimpinan perguruan tinggi untuk menerapkannya. Apabila ingin memberikan pendidikan berkarakter dan berkualitas, maka kebiakan dalam mengatur *team teaching* (tatap muka dalam tim dosen, bukan berarti giliran mengajar dalam satu mata kuliah), mengatur penjadwalan, menyediakan fasilitas ruangan dan alat, komitmen, dan insentif bagi dosen yang memadai. Adapun ciri-ciri kurikulum berbasis kompetensi yaitu; *pertama*, menyatakan secara jelas rincian kompetensi peserta didik sebagai luaran proses pembelajaran; *kedua*, materi ajar dan proses pembelajaran dirancang dengan orientasi pada pencapaian kompetensi dan berfokus pada minat peserta didik (*Student Centered Learning*); *ketiga*, lebih mensinergikan dan mengintegrasikan penguasaan ranah kognitif,

psikomotorik dan afektif; *keempat*, proses penilaian hasil belajar lebih ditekankan pada kemampuan untuk berkreasi secara prosedur atas dasar pemahaman penerapan, analisis, dan evaluasi yang benar pula; dan *kelima*, disusun oleh penyelenggara pendidikan tinggi dan pihak-pihak berkepentingan terhadap lulusan pendidikan tinggi (masyarakat profesi dan pengguna lulusan).

Perubahan kurikulum berarti juga perubahan pembelajarannya. Dalam kurikulum inti dan institusional, model pembelajarannya didasarkan pada proses *transfer of knowledge*, di mana dosen/pengajar menjadi *Teacher-Centered Learning* (TCL) atau *Teacher-Centered Content-Oriented* (TCCO). Keadaan ini berubah ke arah penggunaan prinsip *Student-Centered Learning* (SCL) yang disesuaikan dengan keadaan perguruan tinggi. SCL merupakan suatu proses pembekalan yang berupa *method of inquiry* seseorang yang berkompeten dalam berkarya di masyarakat. Dengan demikian tampak jelas bahwa perubahan kurikulum dari kurikulum berbasis penguasaan ilmu pengetahuan dan keterampilan (KBI sesuai Kepmendikbud No. 056/U/1994) ke KBK (sesuai Kepmendiknas No. 232/U/2000, mempunyai beberapa harapan keunggulan yaitu luaran hasil pendidikan (*outcomes*) yang diharapkan sesuai dengan *societal needs*, *industrial/business needs*, dan *professional needs*; dengan pengertian bahwa *outcomes* merupakan kemampuan mengintegrasikan *intellectual skill*, *knowledge* dan afektif dalam sebuah perilaku secara utuh (Sub Direktorat KPS, 2009).

Model Pembelajaran dalam KBK, kompetensi dalam proses pendidikan dipahami sebagai gabungan kemampuan kognitif, psikomotorik dan afektif yang tercermin dalam perilaku, atau dalam dunia kerja digunakan istilah gabungan *hardskills* dan *softskills*, di mana *hardskills* dimaksudkan sebagai kemampuan yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi (kemampuan teknis), sedang *softskills* dimaknai sebagai kemampuan interpersonal dan intrapersonal (non teknis). Dalam pembelajaran yang mengarah tercapainya kompetensi, akan dipilih model pembelajaran yang selain dapat

menghasilkan *hardskills*, juga harus dapat menumbuhkan *softskills* pada anak didik (Silvi Dewijani, 2010:19-21).

Alasan diberlakukannya KBK sendiri karena terjadi perubahan kondisi termasuk pergeseran paradigma. Pergeseran paradigma tersebut dapat dilihat dari beberapa indikator, seperti *focus*, *ownership*, *expectations*, *leadership*, *students*, *mistakes*, *classes*, dan *emphasis*. Perubahan pembelajaran dari *teacher centered learning* menjadi *student centered learning*, dikarenakan kondisi global (persaingan, persyaratan kerja, perubahan orientasi) yang nantinya akan membawa perubahan pada kompetensi lulusan serta perubahan paradigma belajar dan mengajar yang nantinya diharapkan dapat terjadi perubahan kurikulum yang berdampak pada perubahan perilaku pembelajaran yang akan menghasilkan peningkatan mutu lulusan dan relevansi (Tarmidi, 2010:5).

Selama ini terjadi kesenjangan kemampuan lulusan adalah perbandingan prosentase *hard skill* dan *soft skill* yang terlalu jauh, yaitu 20% dan 80%. Padahal faktor yang memberi kontribusi keberhasilan dalam dunia kerja terdiri dari faktor finansial sebanyak 10%, faktor keahlian pada bidangnya 20%, *networking* 30%, dan 40% sisanya adalah *softskill*. *Softskill* terdiri dari 2 macam, yaitu *interpersonals skill* dan *intrapersonals skills*. *Interpersonals skills* meliputi *motivation skills*, *leadership skills*, *negotiation skills*, *presentation skill*, *communication skills*, *relationship building*, *public speaking*, dan *self-marketing skills*. *Intrapersonal skills* meliputi *time management*, *stress management*, *change management*, *transforming beliefs*, *transforming character*, *creative thinking processes*, *good setting* dan *life purpose*, dan *accelerated learning techniques* (Tarmidi, 2010: 5). KBK dengan metode pembelajaran SCL, memiliki beragam model pembelajaran yang dapat digunakan untuk mengembangkan *hardskills* sekaligus *softskills*. Model-model tersebut antara lain *Small Group Discussion*, *Role Play & Simulation*, *Case Study*, *Discovery Learning (DL)*, *Self-Directed Learning (SDL)*, *Cooperative Learning (CL)*, *Collaborative Learning (CbL)*, *Contextual Instruction (CI)*, *Project Based Learning*, dan *Problem Based Learning and Inquiry (PBL)*. Selain model-model ini,

masih ada lain, bahkan setiap dosen dapat mengembangkan model pembelajarannya sendiri (Sub Direktorat KPS, 2009: 26).

1. *Bentuk Perubahan*

Pembaharuan konsep kurikulum pendidikan tinggi yang dituangkan dalam Kepmendiknas No. 232/U/2000 dan No. 045/U/2002, yang mengacu kepada konsep pendidikan tinggi abad XXI UNESCO (1998), terdapat perubahan yang mendasar yaitu: 1) Luaran hasil pendidikan tinggi yang semula berupa kemampuan minimal penguasaan pengetahuan, ketrampilan, dan sikap sesuai dengan sasaran kurikulum suatu Program studi, diganti dengan kompetensi seseorang untuk dapat melakukan seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggungjawab sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang pekerjaan tertentu. Luaran hasil pendidikan tinggi ini yang semula penilaiannya dilakukan oleh penyelenggara pendidikan tinggi sendiri, dalam konsep yang baru penilaian selain oleh perguruan tinggi juga dilakukan oleh masyarakat pemangku kepentingan; 2) Kurikulum program studi yang semula disusun dan ditetapkan oleh Pemerintah lewat sebuah Konsorsium (Kurikulum Nasional), diubah, yakni kurikulum inti disusun oleh perguruan tinggi bersama-sama dengan pemangku kepentingan dan kalangan profesi, dan ditetapkan oleh perguruan tinggi yang bersangkutan; 3) Berdasarkan Kepmendikbud No. 056/U/1994 komponen kurikulum tersusun atas Kurikulum Nasional (Kurnas) dan Kurikulum Lokal (Kurlok) yang disusun dengan tujuan untuk menguasai isi ilmu pengetahuan dan penerapannya (*content based*), sedangkan dalam Kepmendiknas No. 232/U/2000 disebutkan bahwa kurikulum terdiri atas Kurikulum Inti dan Kurikulum Institusional. Kurikulum Inti merupakan penciri dari kompetensi utama, ditetapkan oleh kalangan perguruan tinggi bersama masyarakat profesi dan pengguna lulusan; dan 4) Dalam Kurikulum Nasional terdapat pengelompokan mata kuliah yang terdiri atas: Mata Kuliah Umum (MKU), Mata Kuliah Dasar Keahlian (MKDK), dan Mata Kuliah Keahlian (MKK). Sedangkan dalam Kepmendiknas no 232/U/2000,

Kurikulum terdiri atas kelompok-kelompok Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian (MPK), Mata Kuliah Keilmuan dan Keterampilan (MKK), Mata Kuliah Keahlian Berkarya (MKB), Mata Kuliah Perilaku Berkarya (MPB), serta Mata Kuliah Berkehidupan Bersama (MBB). Namun, pada Kepmendiknas No.045/U/2002, pengelompokkan mata kuliah tersebut diluruskan maknanya agar lebih luas dan tepat melalui pengelompokkan berdasarkan elemen kompetensinya, yaitu (a) landasan kepribadian; (b) penguasaan ilmu dan keterampilan; (c) kemampuan berkarya; (d) sikap dan perilaku dalam berkarya menurut tingkat keahlian berdasarkan ilmu dan keterampilan yang dikuasai; dan (e) pemahaman kaidah berkehidupan bermasyarakat sesuai dengan pilihan keahlian dalam berkarya.

Konsep ini untuk dapat mengakomodasi kebutuhan masyarakat yang menjadikan perguruan tinggi menjadi tempat pembelajaran dan suatu sumberdaya pengetahuan, pusat kebudayaan, serta tempat pembelajaran terbuka untuk semua, maka dimasukkan strategi kebudayaan dalam pengembangan pendidikan tinggi. Strategi kebudayaan tersebut berujud kemampuan untuk menangani masalah-masalah yang terkait dengan aspek : (a) fenomena *anthrophos*, dicakup dalam Pengembangan manusia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, berkepribadian mantap, dan mandiri serta mempunyai rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan; (b) fenomena *tekne*, dicakup dalam penguasaan ilmu dan keterampilan untuk mencapai derajat keahlian berkarya; (c) fenomena *oikos*, dicakup dalam kemampuan untuk memahami kaidah kehidupan bermasyarakat sesuai dengan pilihan keahlian dalam berkarya; (d) fenomena *etnos*, dicakup dalam pembentukan sikap dan perilaku yang diperlukan seseorang dalam berkarya menurut tingkat keahlian berdasarkan ilmu dan keahlian yang dikuasai; dan (e) perubahan kurikulum juga berarti perubahan pembelajarannya, sehingga dengan konsep diatas proses pembelajaran yang dilakukan di pendidikan tinggi tidak hanya sekedar suatu proses *transfer of*

knowledge, namun benar-benar merupakan suatu proses pembekalan yang berupa *method of inquiry* seseorang yang berkompeten dalam berkarya di masyarakat. Dengan demikian secara jelas akan tampak bahwa perubahan kurikulum dari kurikulum berbasis penguasaan ilmu pengetahuan dan ketrampilan (KBI) sesuai Kepmendikbud No.056/U/1994, ke KBK menurut Kepmendiknas No. 232/U/2000, mempunyai beberapa harapan keunggulan, yaitu : "keluaran hasil pendidikan (*outcomes*) yang diharapkan sesuai dengan *societal needs, industrial/business needs*, dan *professional needs*; dengan pengertian bahwa *outcomes* merupakan kemampuan mengintegrasikan *intellectual skill, knowledge dan afektif* dalam sebuah perilaku secara utuh".

Beberapa perubahan konsep dari kurikulum berbasis isi (Kepmendikbud 056/U/1994) ke Kurikulum berbasis kompetensi (Kepmendiknas no. 232/U/2000 dan 045/U/2002) dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1
Perubahan Konsep Kurikulum

PERUBAHAN KONSEP KURIKULUM			
No	Tinjauan	Kurikulum Berbasis Isi (Kurnas 1994)	Kurikulum Berbasis Kompetensi (2000)
1	Latar belakang Perubahan	Masalah internal	Masalah global
2	Basis kurikulum	Berbasis isi (<i>Content Based Curriculum</i>)	Berbasis kompetensi (<i>Competency Based Curriculum</i>)
3	Luaran PT	Kemampuan minimal sesuai sasaran kurikulumnya	Kompetensi yang dianggap mampu oleh masyarakat
4	Penilai kualitas lulusan	Perguruan tinggi sendiri	Perguruan Tinggi dan pengguna lulusan/ stakeholders.
5	Cara Menyusun	Mulai dari isi keilmuannya	Mulai dari penetapan profil lulusan dan

			kompetensi
6	Penekanan	Output , lebih banyak menekankan <i>hard skill</i>	<i>Outcome</i> , keseimbangan <i>hardskill</i> dan <i>softskill</i>
7	Pembelajaran	Teacher centered learning (TCL), dengan titik berat pada <i>transfer of knowledge</i>	<i>Student centered learning</i> (SCL), diarahkan pada pembekalan <i>method of inquiry and discovery</i>

2. Memahami lebih dalam Kepmendiknas NO. 232/U/2000 dan No. 045/U/2002

Dalam Kepmendiknas No. 232/U/2000 memang terdapat hal-hal yang belum seluruhnya jelas dan karena tidak ada petunjuk teknis yang menyertainya, menjadikan perguruan tinggi sulit untuk melaksanakannya. Hal ini terungkap dalam kajian yang dilakukan oleh Tim Kelompok Kerja Inventarisasi dan Evaluasi Implementasi Kurikulum DIKTI di Perguruan Tinggi tahun 2003 yang mensurvey perguruan tinggi yang telah merekonstruksi dan mengimplementasikan kurikulumnya sesuai dengan isi Kepmendiknas tersebut.

Berdasarkan studi yang telah dilaksanakan tersebut diperoleh data bahwa pemahaman terhadap isi Kepmen tersebut masih berbeda-beda dan kesiapan untuk melakukan perubahan kurikulum di perguruan tinggi juga berbeda. Berdasarkan kajian tersebut dikeluarkanlah Kepmendiknas no 045/U/2002 yang dimaksudkan untuk memperjelas dan melengkapi Kepmendiknas 232/U/200 agar bisa dilaksanakan dengan tepat. Untuk memahami konsep kurikulum berbasis kompetensi ini harus dipahami kedua Kepmen tersebut secara utuh. Kedua Kepmen tersebut sebetulnya saling melengkapi, namun pada satu bagian Kepmen tersebut mengandung makna yang berbeda, yaitu bahwa dalam Kepmendiknas No. 232/U/2000 disebutkan bahwa kurikulum terdiri atas kurikulum Inti dan kurikulum institusional yang terdiri atas kelompok-kelompok Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian (MPK), Mata Kuliah

Keilmuan dan Ketrampilan (MKK), Mata Kuliah Keahlian Berkarya (MKB), Mata Kuliah Perilaku Berkarya (MPB), serta Mata Kuliah Berkehidupan Bersama (MBB). Konsep ini adalah runtutan pemikiran yang berusaha mensepadankan antara konsep UNESCO dengan persyaratan kerja hasil survey yang dijadikan referensi oleh DIKTI, kedalam pola lama yaitu adanya pengelompokan mata kuliah seperti tergambar pada tabel berikut ini.

Tabel 2
Usaha Penyepadanan

PERSYARATAN KERJA	IBE UNESCO	KURIKULUM INTI & INSTITUSIONAL
Penguasaan pengetahuan dan ketrampilan : • analisis dan sintesis • <i>menguasai IT/computting</i> • <i>managed ambiguity</i> • <i>communication</i> • <i>2 nd language</i>	<i>learning to know</i>	Matakuliah Keilmuan dan Ketrampilan (MKKK)
	<i>learning to do</i>	Mata kuliah Perilaku Berkarya (MKPB)
Attitude : • kepemimpinan • <i>team working</i> • <i>can work crossculturally</i>	<i>learning to be</i>	Mata kuliah Perilaku Berkarya (MKPB)
Pengenalan sifat pekerjaan terkait : • Terlatih dalam etika kerja • Memahami makna globalisasi • Fleksibel thd pilihan pekerjaan	<i>learning to live together</i>	Mata kuliah berkehidupan bersama (MKBB)
		MK Pengemb. Kepribadian (MKPK)

Namun, pada SK Mendiknas No. 045/U/2002, pengelompokan mata kuliah tersebut diluruskan maknanya agar penyusunan kurikulum tidak terfokus pada usaha pengelompokan mata kuliah tetapi lebih kearah pencapaian kompetensi yang mengandung elemen-elemen kompetensi sebagai berikut: (a) landasan kepribadian; (b) penguasaan ilmu dan keterampilan; (c)

kemampuan berkarya; (d) sikap dan perilaku dalam berkarya menurut tingkat keahlian berdasarkan ilmu dan keterampilan yang dikuasai; (e) pemahaman kaidah berkehidupan bermasyarakat sesuai dengan pilihan keahlian dalam berkarya. Dengan demikian pengelompokan mata kuliah menjadi tidak berperan lagi karena tidak terkait langsung dengan pencapaian kompetensi lulusan. Bisa terjadi satu mata kuliah dibangun untuk mencapai satu atau lebih kompetensi (*learning todo, learning to know, learning to be, learning to live together*), dan sebaliknya satu kompetensi dapat dicapai lewat lebih dari satu mata kuliah, sehingga pengelompokan mata kuliah menjadi sulit dilakukan atau dapat dikatakan tidak bisa dilakukan, kecuali dipaksakan.

Jadi pencapaian kompetensilah yang menjadi tujuan/sasaran kurikulum, sedang pengelompokan mata kuliah bukan sasaran perubahan kurikulum. Kurikulum inti menurut Kepmendiknas no.045/U/2002, merupakan penciri dari kompetensi utama, bersifat dasar untuk mencapai kompetensi lulusan, merupakan acuan baku minimal mutu penyelenggaraan program studi, dan ditetapkan oleh kalangan perguruan tinggi (program studi sejenis) bersama masyarakat profesi dan pengguna lulusan. Jadi Kompetensi utama ini merupakan penciri suatu lulusan program studi tertentu, dan ini bisa disepakati dengan mengambil beban dari keseluruhan beban studi sebesar 40% – 80%. Sementara itu kurikulum institusional didalamnya terumuskan kompetensi pendukung dan kompetensi lainnya, yang bersifat khusus dan gayut dengan kompetensi utama suatu program studi dan ditetapkan oleh institusi penyelenggara program studi. Kompetensi pendukung dapat bergerak antara 20% - 40% dari keseluruhan beban studi. Sementara itu kompetensi lainnya equivalen dengan beban studi sebesar 0%- 30% dari keseluruhan.

3. Tahapan Penyusunan Kurikulum

Langkah awal yang harus dilakukan dalam menyusun kurikulum adalah dengan melakukan analisis *SWOT* dan *Tracer Study* serta *Labor Market Signals*. Dalam penyusunan kurikulum

yang sering dilakukan setelah didapat hasil dari analisis hal-hal tersebut adalah menentukan tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan inilah yang kemudian segera dijabarkan dalam mata kuliah yang kemudian dilengkapi dengan bahan ajarnya (silabus) untuk setiap mata kuliah. Sejumlah mata kuliah ini disusun kedalam semester-semester. Penyusunan mata kuliah ke dalam semester biasanya didasarkan pada struktur atau logika urutan sebuah IPTEKS dipelajari, berdasarkan urutan tingkat kerumitan dan kesulitan ilmu yang dipelajari. Kurikulum semacam ini yang sering disebut kurikulum berbasis isi (*content based curriculum*). Dalam hal ini jarang dipertimbangkan apakah lulusannya nanti relevan dengan kebutuhan masyarakat pemangku kepentingan (*stakeholders*) atau tidak. Alternatif penyusunan kurikulum yang berbasis pada kompetensi yang diusulkan, dimulai dengan langkah-langkah berikut: (1) penyusunan profil lulusan, yaitu peran dan fungsi yang diharapkan dapat dijalankan oleh lulusan nantinya di masyarakat; (2) penetapan kompetensi lulusan berdasarkan profil lulusan yang telah diancangkan tadi; (3) penentuan Bahan Kajian yang terkait dengan bidang IPTEKS program studi; (4) penetapan kedalaman dan keluasan kajian (sks) yang dilakukan dengan menganalisis hubungan antara kompetensi dan bahan kajian yang diperlukan; (5) merangkai berbagai bahan kajian tersebut kedalam mata kuliah; (6) menyusun struktur kurikulum dengan cara mendistribusikan mata kuliah tersebut dalam semester; (7) mengembangkan Rancangan Pembelajaran; dan secara simultan; dan (8) memilih metode pembelajaran yang tepat untuk mencapai kompetensinya.

Tahapan-tahapan diatas dapat diuraikan lebih lanjut sebagai berikut:

Pertama, Penetapan profil lulusan. Yang dimaksudkan dengan profil adalah peran yang diharapkan dapat dilakukan oleh lulusan program studi di masyarakat/ dunia kerja. Profil ini adalah *outcome* pendidikan yang akan dituju. Dengan menetapkan profil, perguruan tinggi dapat memberikan jaminan pada calon mahasiswanya akan bisa berperan menjadi apa saja setelah ia menjalani semua proses

pembelajaran di program studinya. Untuk menetapkan profil lulusan, dapat dimulai dengan menjawab pertanyaan: “Setelah lulus nanti, akan menjadi apa saja lulusan program studi ini?” Profil ini bisa saja merupakan profesi tertentu misal dokter, pengacara, apoteker, dan lainnya, tetapi juga bisa sebuah peran tertentu seperti manajer, pendidik, peneliti, atau juga sebuah peran yang lebih umum yang sangat dibutuhkan didalam banyak kondisi dan situasi kerja seperti komunikator, kreator, pemimpin, dan sebagainya.

Kedua, Perumusan kompetensi lulusan. Setelah menetapkan profil lulusan program studi sebagai outcome pendidikan, maka langkah selanjutnya adalah menentukan kompetensi apa saja yang harus dimiliki oleh lulusan program studi sebagai output pembelajarannya. Untuk menetapkan kompetensi lulusan, dapat dilakukan dengan menjawab pertanyaan: “Untuk menjadi profil (.....yang ditetapkan) lulusan harus mampu melakukan apa saja?” Pertanyaan ini diulang untuk setiap profil, sehingga diperoleh daftar kompetensi lulusan dengan lengkap. Kompetensi lulusan bisa didapat lewat kajian terhadap tiga unsur yaitu nilai-nilai yang dicanangkan oleh perguruan tinggi (*university values*), visi keilmuan dari program studinya (*scientific vision*), dan kebutuhan masyarakat pemangku kepentingan (*need assesment*). Kompetensi ini terbagi dalam tiga katagori yaitu kompetensi utama; kompetensi pendukung dan kompetensi lainnya, yang kesemuanya akhirnya menjadi rumusan kompetensi lulusan. Seperti penjelasan sebelumnya bahwa kompetensi utama merupakan kompetensi penciiri lulusan sebuah program studi, sedangkan kompetensi pendukung adalah kompetensi yang ditambahkan oleh program studi sendiri untuk memperkuat kompetensi utamanya dan memberi ciri keunggulan program studi tersebut. Sedang kompetensi lainnya adalah kompetensi lulusan yang ditetapkan oleh perguruan tinggi/ program studi sendiri sebagai ciri lulusannya dan untuk memberi bekal lulusan agar mempunyai keluasaan dalam memilih bidang kehidupan serta dapat meningkatkan kualitas hidupnya.

Ketiga, Pengkajian kandungan elemen kompetensi . Setelah semua kompetensi lulusan terumuskan, langkah selanjutnya adalah mengkaji apakah kompetensi tersebut telah mengandung kelima elemen kompetensi seperti yang diwajibkan dalam Kepmendiknas No.045/U/2002. Kelima elemen kompetensi tersebut adalah: (a) landasan kepribadian; (b) penguasaan ilmu dan keterampilan; (c) kemampuan berkarya; (d) sikap dan perilaku dalam berkarya menurut tingkat keahlian berdasarkan ilmu dan keterampilan yang dikuasai; dan (e) pemahaman kaidah berkehidupan bermasyarakat sesuai dengan pilihan keahlian dalam berkarya. Setiap kompetensi lulusan dianalisis apakah mengandung satu atau lebih elemen-elemen kompetensi tersebut. Untuk menganalisis adanya muatan elemen kompetensi di setiap kompetensi, salah satu cara yang bisa dilakukan adalah dengan mengecek kemungkinan strategi pembelajaran yang akan diterapkan untuk mencapai kompetensi tersebut. Jika kompetensi mengandung elemen: (a) landasan kepribadian yang lebih bersifat softskills, nantinya bisa diselipkan dalam bentuk *hidden curriculum*. Jika kompetensi tersebut mengandung elemen; (b) penguasaan ilmu dan ketrampilan, maka bisa diajarkan dalam bentuk mata kuliah. Jika kompetensi mengandung elemen; (c) kemampuan berkarya, maka kompetensi tersebut bisa ditempuh dengan praktek kerja tertentu, dan bila kompetensi tersebut mengandung elemen; (d) sikap dan perilaku dalam berkarya, maka di dalam praktek kerja tersebut harus bermuatan sikap dan perilaku. Terakhir, bila kompetensi tersebut mengandung elemen; dan (e) pemahaman kaidah berkehidupan bermasyarakat, maka kompetensi tersebut bisa diperoleh dengan strategi praktek kerja di masyarakat. Pemeriksaan keterkaitan rumusan kompetensi lulusan dengan elemen kompetensi ini dimaksudkan untuk meyakinkan bahwa kurikulum yang kita susun telah mempertimbangkan unsur-unsur dasar dari kurikulum yang disarankan oleh UNESCO (*learning to know, learning to do, learning to be, dan learning to live together*) dan Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional (landasan kepribadian).

Keempat, Pemilihan bahan kajian. Setelah menganalisis elemen kompetensi maka langkah selanjutnya adalah menentukan bahan kajian yang akan dipelajari dalam rangka mencapai kompetensi yang telah ditetapkan sebelumnya. Bahan kajian adalah suatu bangunan ilmu, teknologi atau seni, obyek yang dipelajari, yang menunjukkan ciri cabang ilmu tertentu, atau dengan kata lain menunjukkan bidang kajian atau inti keilmuan suatu program studi. Bahan kajian dapat pula merupakan pengetahuan/bidang kajian yang akan dikembangkan, keilmuan yang sangat potensial atau dibutuhkan masyarakat untuk masa datang. Pilihan bahan kajian ini sangat dipengaruhi oleh visi keilmuan program studi yang bersangkutan, yang biasanya dapat diambil dari program pengembangan program studi (misalnya diambil dari pohon penelitian program studi). Tingkat keluasaan, kerincian, dan kedalaman bahan kajian ini merupakan pilihan otonom masyarakat ilmiah di program studi tersebut. Bahan kajian bukan merupakan mata kuliah. Contoh bahan kajian yang sering ditemui misalnya pada bidang agroteknologi adalah (1) Ilmu Tanaman; (2) Media Tanam; (3) Teknologi Tanaman; (4) Lingkungan. Contoh lain adalah pada program studi psikologi (1) Psikologi dasar (Umum dan Eksperimen); (2) Psikologi Perkembangan; (3) kajian Psikodiagnostik dan Psikometri; (4) Kajian Sosial.

Kelima, Perkiraan dan penetapan beban (sks) dan pembentukan mata kuliah. Selama ini pengertian sks hanya berkaitan dengan waktu satu kegiatan pembelajaran, tanpa dikaitkan dengan variabel lain. Hanya macam kegiatan yang dideskripsikan. Seperti pengertian 1 sks mata kuliah yang dilakukan dengan perkuliahan (ceramah) diartikan tiga macam kegiatan, yaitu kegiatan tatap muka selama 50 menit, kegiatan belajar terstruktur selama 60 menit, dan kegiatan belajar mandiri selama 60-100 menit, semuanya dalam satuan perminggu, persemester. Banyak program studi yang hanya menerima sks dari tahun ke tahun tanpa memahami cara menetapkannya. Selama ini perkiraan besarnya sks sebuah mata kuliah lebih banyak ditetapkan atas dasar pengalaman dan terutama

menyangkut banyaknya bahan kajian yang harus disampaikan. Hal ini bisa dimengerti karena selain sks hanya terkait dengan waktu, kurikulum yang dilaksanakan adalah kurikulum berbasis isi (KBI), serta kegiatannya lebih banyak berupa kuliah/ceramah (TCL). Sehingga besarnya sks suatu mata kuliah sepertinya menjadi hak dosen pengampunya, yaitu berdasar pada materi yang ia kuasai dan yang harus ia ajarkan. Dengan paradigma KBK, maka seharusnya sks terkait dengan kompetensi yang harus dicapai. Pengertian sks tetap berkaitan dengan waktu, hanya perkiraan besarnya sks sebuah mata kuliah atau suatu pengalaman belajar yang direncanakan, dilakukan dengan menganalisis secara simultan beberapa variabel, yaitu: (a) tingkat kemampuan/kompetensi yang ingin dicapai; (b) tingkat keluasan dan kedalaman bahan kajian yang dipelajari; (c) cara/strategi pembelajaran yang akan diterapkan; (d) dan posisi (letak semester) suatu kegiatan pembelajaran dilakukan; dan (e) perbandingan terhadap keseluruhan beban studi di satu semester. Sehingga dalam KBK yang lebih menitik beratkan pada kemampuan/kompetensi mahasiswanya, secara prinsip pengertian sks harus dipahami sebagai: waktu yang dibutuhkan oleh mahasiswa untuk mencapai kompetensi tertentu, dengan melalui suatu bentuk pembelajaran dan bahan kajian tertentu.

4. *Pembelajaran dalam KBK*

Proses pembelajaran yang banyak dipraktekkan sekarang ini sebagian besar berbentuk penyampaian secara tatap muka (*lecturing*), searah. Pada saat mengikuti kuliah atau mendengarkan ceramah, mahasiswa akan kesulitan untuk mengikuti atau menangkap makna esensi materi pembelajaran, sehingga kegiatannya sebatas membuat catatan yang kebenarannya diragukan. Pola proses pembelajaran dosen aktif dengan mahasiswa pasif ini efektifitasnya rendah, dan tidak dapat menumbuhkembangkan proses partisipasi aktif dalam pembelajaran. Keadaan ini terjadi sebagai akibat elemen-elemen terbentuknya proses partisipasi yang berupa, (a) dorongan untuk

memperoleh harapan (*effort*); (b) kemampuan mengikuti proses pembelajaran; dan (c) peluang untuk mengungkapkan materi pembelajaran yang diperolehnya di dunia nyata/masyarakat tidak ada atau sangat terbatas. Intensitas pembelajaran mahasiswa umumnya meningkat (tetapi tetap tidak efektif), terjadi pada saat-saat akhir mendekati ujian. Akibatnya mutu materi dan proses pembelajaran sangat sulit untuk diakses.

Dosen menjadi pusat peran dalam pencapaian hasil pembelajaran dan seakan-akan menjadi satu-satunya sumber ilmu. Perbaikan pola pembelajaran ini telah banyak dilakukan dengan kombinasi *lecturing*, tanya-jawab, dan pemberian tugas, yang kesemuanya dilakukan berdasarkan "pengalaman mengajar" dosen yang bersangkutan dan bersifat *trial-error*. Luaran proses pembelajaran tetap tidak dapat diases, serta memerlukan waktu lama pelaksanaan perbaikannya. Pola pembelajaran di perguruan tinggi yang berlangsung saat sekarang perlu dikaji untuk dapat dipetakan pola keragamannya. Oleh karenanya perlu dilakukan perubahan dalam proses dan materi pembelajaran di perguruan tinggi tidak lagi berbentuk *Teacher-Centered Content-Oriented* (TCCO), tetapi diganti dengan menggunakan prinsip *Student-Centered Learning* (SCL) yang disesuaikan dengan keadaan perguruan tingginya.

Pola pembelajaran yang terpusat pada dosen seperti yang dipraktekkan pada saat ini kurang memadai untuk mencapai tujuan pendidikan berbasis kompetensi. Berbagai alasan yang dapat dikemukakan antara lain adalah: (a) perkembangan IPTEK dan Seni yang sangat pesat dengan berbagai kemudahan untuk mengaksesnya merupakan materi pembelajaran yang sulit dapat dipenuhi oleh seorang dosen; (b) perubahan kompetensi kekarayaan yang berlangsung sangat cepat memerlukan materi dan proses pembelajaran yang lebih fleksibel; dan (c) kebutuhan untuk mengakomodasi demokratisasi partisipatif dalam proses pembelajaran di perguruan tinggi. Oleh karena itu pembelajaran ke depan didorong menjadi berpusat pada mahasiswa dengan

memfokuskan pada tercapainya kompetensi yang diharapkan. Hal ini berarti mahasiswa harus didorong untuk memiliki motivasi dalam diri mereka sendiri, kemudian berupaya keras mencapai kompetensi yang diinginkan. Ketiga alasan pergeseran pembelajaran yang diuraikan diatas merupakan alasan diluar esensi proses pembelajaran itu sendiri.

Bila ditinjau esensinya, pergeseran pembelajaran adalah pergeseran paradigma, yaitu paradigma dalam cara kita memandang pengetahuan, paradigma belajar dan pembelajaran itu sendiri. Paradigma lama memandang pengetahuan sebagai sesuatu yang sudah jadi, yang tinggal dipindahkan ke orang lain/mahasiswa dengan istilah *transfer of knowledge*. Paradigma baru, pengetahuan adalah sebuah hasil konstruksi atau bentukan dari orang yang belajar. Sehingga belajar adalah sebuah proses mencari dan membentuk/ mengkonstruksi pengetahuan, jadi bersifat aktif, dan spesifik caranya. Sedangkan dengan paradigma lama belajar adalah menerima pengetahuan, pasif, karena pengetahuan yang telah dianggap jadi tadi tinggal dipindahkan ke mahasiswa dari dosen, akibatnya bentuknya berupa penyampaian materi (ceramah).

Dosen sebagai pemilik dan pemberi pengetahuan, mahasiswa sebagai penerima pengetahuan, kegiatan ini sering dinamakan pengajaran. Dengan pola ini perencanaan pengajarannya (GPPP dan SAP) lebih banyak mendeskripsikan kegiatan yang harus dilakukan oleh pengajar, sedang bagi mahasiswa perencanaan tersebut lebih banyak bersifat instruksi yang harus dijalankan. Konsekuensi paradigma baru adalah dosen hanya sebagai fasilitator dan motivator dengan menyediakan beberapa strategi belajar yang memungkinkan mahasiswa (bersama dosen) memilih, menemukan dan menyusun pengetahuan serta cara mengembangkan ketrampilannya (*method of inquiry and discovery*). Dengan paradigma inilah proses pembelajaran (*learning* proses yang dilakukan).

Secara lebih rinci perbedaan antara metode pembelajaran berpusat pada guru (*Teacher Centered Learning*) dan *Student Centered Learning* antara lain seperti berikut:

Tabel 3
Perbedaan TCL dan SCL

No	<i>Teacher Centered Learning</i>	<i>Student Centered Learning</i>
1	Pengetahuan ditransfer dari dosen ke Mahasiswa	Mahasiswa secara aktif mengembangkan pengetahuan dan keterampilan yang dipelajarinya
2	Mahasiswa menerima pengetahuan secara pasif	Mahasiswa secara aktif terlibat di dalam mengelola pengetahuan
3	Lebih menekankan pada penguasaan Materi	Tidak hanya menekankan pada penguasaan materi tetapi juga dalam mengembangkan karakter mahasiswa (<i>life-long learning</i>)
4	Biasanya memanfaatkan media tunggal	Memanfaatkan banyak media (<i>multimedia</i>)
5	Fungsi dosen atau pengajar sebagai pemberi informasi utama dan evaluator	Fungsi dosen sebagai fasilitator dan evaluasi dilakukan bersama dengan mahasiswa.
6	Proses pembelajaran dan penilaian dilakukan secara terpisah	Proses pembelajaran dan penilaian dilakukan saling berkesinambungan dan terintegrasi
7	Menekankan pada jawaban yang benar saja	Penekanan pada proses pengembangan pengetahuan. Kesalahan dinilai dapat menjadi salah satu sumber belajar.
8	Sesuai untuk mengembangkan ilmu dalam satu disiplin saja	Sesuai untuk pengembangan ilmu dengan cara pendekatan interdisipliner
9	Iklim belajar lebih individualis dan Kompetitif	Iklim yang dikembangkan lebih bersifat kolaboratif, suportif dan kooperatif
10	Hanya mahasiswa yang dianggap melakukan proses pembelajaran	Mahasiswa dan dosen belajar bersama di dalam mengembangkan pengetahuan, konsep dan keterampilan.
11	Perkuliahan merupakan bagian terbesar dalam proses pembelajaran	Mahasiswa dapat belajar tidak hanya dari perkuliahan saja tetapi dapat menggunakan berbagai cara dan kegiatan
12	Penekanan pada tuntasnya materi Pembelajaran	Penekanan pada pencapaian kompetensi peserta didik dan bukan tuntasnya materi.
13	Penekanan pada bagaimana cara dosen melakukan pembelajaran	Penekanan pada bagaimana cara mahasiswa dapat belajar dengan

		menggunakan berbagai bahan pelajaran, metode interdisipliner, penekanan pada <i>problem based learning</i> dan <i>skill competency</i> .
--	--	--

Di dalam proses pembelajaran SCL, dosen masih memiliki peran yang penting seperti dalam rincian tugas berikut ini :

- a. Bertindak sebagai fasilitator dan motivator dalam proses pembelajaran.
- b. Mengkaji kompetensi matakuliah yang perlu dikuasai mahasiswa di akhir pembelajaran
- c. Merancang strategi dan lingkungan pembelajaran dengan menyediakan berbagai pengalaman belajar yang diperlukan mahasiswa dalam rangka mencapai kompetensi yang dibebankan pada matakuliah yang diampu.
- d. Membantu mahasiswa mengakses informasi, menata dan memprosesnya untuk dimanfaatkan dalam memecahkan permasalahan nyata
- e. Mengidentifikasi dan menentukan pola penilaian hasil belajar mahasiswa yang relevan dengan kompetensinya.

Sementara itu, peran yang harus dilakukan mahasiswa dalam pembelajaran SCL adalah:

- a. Mengkaji kompetensi matakuliah yang dipaparkan dosen
- b. Mengkaji strategi pembelajaran yang ditawarkan dosen
- c. Membuat rencana pembelajaran untuk matakuliah yang diikutinya
- d. Belajar secara aktif (dengan cara mendengar, membaca, menulis, diskusi, dan terlibat dalam pemecahan masalah serta lebih penting lagi terlibat dalam kegiatan berfikir tingkat tinggi seperti analisis, sintesis dan evaluasi), baik secara individu maupun berkelompok
- e. Mengoptimalkan kemampuan dirinya

C. Kesimpulan

Perubahan jaman dan permintaan pasar kerja membutuhkan lulusan pendidikan tinggi yang memiliki kompetensi yang memadai sesuai bidang pekerjaannya. Perubahan sosial ini seharusnya membawa kesadaran pada para penyelenggara pendidikan tinggi untuk segera merubah kurikulumnya agar sesuai dengan tuntutan jaman, akan tetapi yang terjadi adalah mereka masih asyik masyuk dengan kurikulum lama yang terbukti kegagalannya dalam menjawab tantangan jaman.

Pengembangan kurikulum di perguruan tinggi memerlukan perencanaan yang strategis dan menyeluruh, dengan mengacu pada undang-undang dan peraturan pemerintah yang mengatur penyelenggaraan pendidikan tinggi. Penyusun kurikulum perlu memperhatikan wawasan nasional, kualitas internasional, kekhasan/potensi lokal, dan *collective intelligence* di antara para dosen. Secara teknis, penyusun kurikulum – dengan dukungan pimpinan satuan pendidikan/program studi – memerlukan pemahaman tentang perancangan kurikulum serta konsep, proses, dan langkah-langkah pengembangan kurikulum agar penyusun kurikulum dapat melaksanakan tugasnya secara efektif dan efisien.

Kurikulum terpadu dan KBK sudah menjadi keniscayaan bagi perguruan tinggi. Kurikulum terpadu merupakan refleksi fenomena atau refleksi kehidupan dan bagian tak terpisahkan dari inovasi pembelajaran yang mengajak dan mendorong para mahasiswa untuk belajar dan berdiskusi secara kontekstual, mempelajari fenomena yang telah tersedia secara alamiah. Dengan mengacu pada visi dan misi institusi, KBK dapat disusun melalui berbagai macam cara atau alternatif, dengan melibatkan para dosen dan *stakeholders*.

Daftar Pustaka

- Arifin, Anwar. 2005. *Paradigma Baru Pendidikan Nasional*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Barrie, J. dan R.W. Pace. 1997. *Competence, Efficiency, and Organizational Learning*". *Human Resource Development Quarterly*. Vol. 8 No. 4. Winter.
- Barry, K. dan L. King. 1993. *Beginning Teaching*. Australia: Social Science Press.
- Brown, J.W. dkk. 1977. *AV Instructional Technology, Media and Methods*. New York: McGraw-Hill Book Company.
- Castells, M. 1996. *The Rise of The Network Society*. Vol. I. Cambridge Mass: Blackwell Publ.
- Chappell, C. 1996. *Quantity and Competency based Education and Training*. The Literacy Education.
- Collin, C. 1993. *Competencies: The Competencies Debate in Australian Education and Training*. Curtin: Australian College of Education.
- Cooper, J.M. 1982. *Classroom Teaching Skills*. Lexington: D.C. Heath and Company.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2003. *Pelayanan Profesional Kurikulum 2004, Kurikulum Berbasis Kompetensi*. Jakarta: Pusat Kurikulum dan Balitbang Depdiknas.
- , 2000. *Keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa*. Jakarta.
- , 2005. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan*. Jakarta.
- Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
<http://www.nakertrans.go.id/pusdatinnaker/BPS/Penganggur/penganggur.htm>
- Dewijani, Silvi. 2010. *Pergeseran Paradigma Ke Arah KBK, Menuju Perguruan Tinggi yang Berkualitas*. Makalah. Purwokerto.

- Drucker, Peter F. 1992. *Managing for The Future The Iggos and Beyond*. New York: Penguin.
- Erridge, A. dan S. Perry. 1994. "The Validity and Value of National Vocational Qualification", *British Journal of Education and Work*. Vol. 7. No. 2.
- Friedman, J. 1994. *Cultural Identity and Global Process*. London: Sage Publ.
- Giddens, A. 1990. *The Consequences of Modernity*. Polity Press: United Kingdom.
- Gonczi, A. 1997. *Future Direction for Vocational Education in Autralia Secondary Schools*. Australia and New Zealand Journal of Vocational Education Research. Vol. 5 No. 1.
- Gordon, T. 1974. *Teacher Effectiveness Training*. New York: David McKay Company.
- Harris, R. et all. 1995. *Competency based Education and Training: Between a Rock and Whirlpool*, Sout Melbourne: MacMillan Education Australia; Hodkinson, P dan M. Issitt (eds). 1995. *The Challenge of Competence*. New York: Casell; Hyland, T. 1994. *Competence, Education and NVQs: Dissenting Perspectives*, London: Cassell.
- Harsono, Yohannes HC. 2005. *Kurikulum Terpadu. Pusat Pengembangan Pendidikan*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- , 2005. *Pengantar Problem-based Learning*. Yogyakarta: Medika.
- Hendricks, J. 1994. *Total Learning*. New York: Macmillan College Publishing Company.
- Hyland, T. 1997. *National Vocational Qualifications, Skill Training and Employers' Need*". Journal of Vocational Education for the Workplace.
- Inkeles, A. dan D.H. Smith. 1974. *Becoming Modern Individual Change in Six Developing Countries*. Cambridge: Harvard University Press.

- Jackson, N. 1994. *If Competence is the Answer, What is the Question? A Collection of Original Essay on Curriculum for the Workplace*.
- Jones, L. dan R. Moore. 1995. *Appropriating Competence*. British Journal of Education and Work. Vol. 8 No. 2.
- Kotter, P. 1955. *The New Rules How to Succeed in Today's Post-Corporate World*. New York: The Free Press.
- Marshall, G. 1992. *Oxford, Concise Dictionary of Sociology*. Oxford: Univ. Press.
- Robertson, R. (1992). *Globalization Social Theory and Global Culture*. London: Sage Publ.
- Sailah, Illah. 2008. *Pengembangan Softskill di Perguruan Tinggi*. Jakarta: Tim Kerja Pengembangan Softskill Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.
- Santyasa, I Wayan. 2004. *Model Pembelajaran Inovatif dalam Implementasi Kurikulum Berbasis Kompetensi*, Makalah pada Penataran Guru-guru SMP, SMP dan SMK se-Jembrana.
- Satryo, Soemantri Brojonegoro dkk. 2001. *Implementasi Paradigma Baru di Perguruan Tinggi, Reformasi Pendidikan Dalam Konteks Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Adicita Karya Nusa.
- Silberman, C.E. 1970. *Crisis in the Classroom*. New York: Random House.
- Siregar, Narumondang Bulan. 2000. *Perencanaan Kebutuhan Material (Material Requirement Planning) Berdasarkan Sistem Industri Modern Dengan Pendekatan Sistem MRP II*. Medan: USU.
- Shephard, R. W. 1970. *Theory of Cost and Production Function*. New Jersey: Princeton University Press.
- Smith, M.D. 1978. *Educational Psychology and Its Classroom Applications*. Boston: Allyn and Bacon.
- Sub Direktorat KPS (Kurikulum dan Program Studi). 2009. *Buku Panduan Pengembangan Kurikulum Berbasis Kompetensi Pendidikan Tinggi (Sebuah Alternatif Penyusunan Kurikulum)*. Jakarta: Sub Direktorat KPS.
- Supriadi, Dedi. 2005.

- Membangun Bangsa Melalui Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Sutjipto, *Kesaksian Seorang Rektor, Siapa Menyuruh Mahasiswa Turun Ke Jalan, Bunga Rampai Sketsa Pendidikan*. Jakarta : Global Mahardika Publications, 2004.
- Tilaar, H.A.R. 1994. *Manajemen Pendidikan Nasional*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- , 2004. *Manajemen Pendidikan Nasional, Kajian Pendidikan Masa Depan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- , 2006. *Standarisasi Pendidikan Nasional, Suatu Tinjauan Kritis*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Tamidi. 2010. *Peranan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) Terhadap Pembentukan Softskill Mahasiswa*. Medan: Fakultas Psikologi Universitas Sumatera Utara.
- Tantra, Dewa Komang. 2009. *Kurikulum Berbasis Kompetensi*. Makalah pada Kegiatan Penyempurnaan Kurikulum Fakultas Seni Rupa dan Desain, ISI Denpasar.
- Thurow, Lester. 1996. *The Future of Capitalism*. London: Nicholas Realy.
- UNESCO. 1998. *Higher Education in the Twenty-first Century: Vision and Action*. World Conference on Higher Education. Paris, 5-9 October 1998.
- Undang-undang No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Weigand, J. 1977. *Implementing Teacher Competencies*. Englewood Cliff: Hall.
- Woodring, P. 1975. *The development of teacher education*. in K. Ryan (ed), *Teacher Education: The seventy fourth yearbook of the national society for a study of education*. Chicago: The University of Chicago Press.